

KAJIAN PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA MANDIRI (BANK SAMPAH) BERBASIS MASYARAKAT DI KOTA YOGYAKARTA

Ahmad Nur Alam Sukrisna Putra
ahmadnuralamsp@gmail.com
Alia Fajarwati, S.Si., M.IDEA.
aliafajar@ugm.ac.id

Abstract

City of Yogyakarta have average of waste amount growth bigger than annual growth of population. Not only that, another problem faced by both of people and government is to find proper place to use as landfill for household waste. On the other side, Piyungan landfill has reached its limit to accommodate amount of waste. Bank Sampah (Garbage Bank) is an alternative way done by Government of City of Yogyakarta through environmental agency. Main goal of this research is to analyze people-based waste management (Bank Sampah) in City of Yogyakarta, analyze people participation in household waste management, and to analyze waste management contribution on solving waste problems in City of Yogyakarta. Method used in this research is qualitative, with survey as data retrieval technic. Data collection method used in this research is direct observation and interview, while data analyzing use descriptive qualitative analyzing method. Using 4 aspects system of waste management (institutional, operational, financial, and regulation), this research result showed garbage bank has already coherent in implementation of SNI 3242-2008. People participation in this program, viewed using Arnstein theory can be categorized as public authority degree because society has placed as one of main stakeholders in order to achieve main vision of Yogyakarta City. Waste reduction from garbage bank program to reduce household waste from its clients need to be improves because there are just only 96% of garbage bank from total garbage bank provided which only can reduce less than 25% of waste amount.

Keywords: Waste, Waste Management, Bank Sampah, People-based

Intisari

Kota Yogyakarta memiliki rata-rata pertumbuhan jumlah sampah di Kota Yogyakarta lebih besar dari pada rata-rata jumlah pertumbuhan penduduknya. Permasalahan tidak berhenti disini, saat ini semakin sulitnya mencari lahan kosong yang dapat difungsikan sebagai tempat pembuangan akhir (TPA) untuk sampah rumah tangga. Sementara TPA Piyungan yang selama ini menjadi tempat terakhir bagi pembuangan sampah pada kenyataannya telah mencapai batasnya. Bank sampah adalah sebuah alternatif cara yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta. Dengan begitu tujuan dari penelitian ini adalah Mengkaji sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat (Bank Sampah) di Kota Yogyakarta, mengkaji peran serta masyarakat dalam hal pengelolaan sampah rumah tangga (Bank Sampah) di Kota Yogyakarta dan mengkaji kontribusi bank sampah dalam mengatasi permasalahan Pengelolaan Sampah di Kota Yogyakarta. Metode yang digunakan untuk penelitian ini berupa metode kualitatif dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode survei. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa Observasi langsung dan wawancara. Serta pengolahan datanya berupa analisis deskriptif kualitatif. Hasil kajian dengan menggunakan 4 aspek sistem pengelolaan sampah (kelembagaan, operasional, pembiayaan dan peraturan/regulasi) menunjukkan bahwa bank sampah sudah sesuai dengan SNI 3242-2008. Partisipasi masyarakat dalam program bank sampah, bila dilihat menggunakan teori Arnstein termasuk derajat kekuasaan masyarakat karena masyarakat telah diposisikan sebagai salah satu *stakeholder* utama dalam pencapaian visi Kota Yogyakarta. Reduksi timbunan sampah dari program bank sampah dalam mengurangi sampah rumah tangga yang di hasilkan nasabahnya masih perlu ditingkatkan karena masih terdapat 96% bank sampah yang hanya mampu mereduksi timbunan sampah kurang dari 25%.

Kata kunci: Sampah, Pengelolaan sampah, Bank sampah, Berbasis masyarakat

PENDAHULUAN

Seiring dengan meningkatnya laju urbanisasi yang cukup tinggi di berbagai kota di Indonesia, masalah persampahan di wilayah perkotaan juga semakin meningkat. Hal ini terjadi karena laju urbanisasi tidak diimbangi dengan penyediaan infrastruktur persampahan yang memadai. Sampah menjadi masalah yang penting saat ini, terutama bagi kota-kota padat penduduk. Bahkan sampah dapat menjadi persoalan krusial, jika tidak ditangani dengan serius. Sampah dapat menyebabkan dampak gangguan bagi infrastruktur kota, termasuk kerawanan kesehatan dan lingkungan hidup. (Santosa, 2009)

Urbanisasi akan berpengaruh pada pertambahan jumlah penduduk. Jika pertambahan jumlah penduduk tidak terkendali akan mengakibatkan perluasan perkotaan (*urban sprawl*) dan akan mengakibatkan bertambahnya timbunan sampah (Visvanathan dkk., 2005).

Kota Yogyakarta sebagaimana kota besar di Indonesia, juga mengalami permasalahan pertambahan jumlah sampah. Menurut Irfan Susilo selaku Kabid Kebersihan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta menjelaskan bahwa volume sampah terangkut di Kota Yogyakarta biasanya perhari kurang lebih mengangkut 240 ton. Bahkan, pada musim libur lebaran volume sampah naik secara signifikan. Volume sampah di Kota Yogyakarta pada hari libur lebaran mencapai 267 ton/hari. Jumlah ini naik 10% dari volume sampah di hari biasa dan peningkatan ini merata di semua sektor. Seperti di tempat kuliner dan wisata Malioboro serta Alun-alun kraton. (www.kotajogja.com)

Permasalahan tidak berhenti disini, saat ini salah satu permasalahan penting yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri yakni berkaitan dengan semakin sulitnya mencari lahan kosong yang dapat difungsikan sebagai tempat pembuangan akhir (TPA) untuk sampah rumah tangga. TPA piyungan yang selama ini menjadi tempat terakhir bagi pembuangan sampah pada kenyataannya akan mencapai batasnya, diperkirakan akan *overload* pada tahun 2015. Dari total kapasitas penampungan sebesar 3,7 juta meter kubik sudah terisi 2 juta meter kubik.

Hal ini menjadi alasan kuat bahwa masalah sampah merupakan masalah utama yang harus dipecahkan baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang.

Kota Yogyakarta memiliki Visi yaitu 'Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa yang **Berwawasan Lingkungan** dan Ekonomi Kerakyatan', sehingga demi tercapainya aspek berwawasan lingkungan maka perlu diwujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan efisien di Kota Yogyakarta.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengeluarkan peraturan daerah No. 10 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Namun dinilai sosialisasi yang dilakukan mengenai Perda No. 10 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah belum optimal. Indikasi dari hal tersebut adalah kebiasaan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan masih berlanjut. Perda ini bukan saja untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri, tetapi juga sebagai upaya untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) Piyungan.

Pemerintah Kota Yogyakarta juga melakukan upaya lain melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) dalam mengatasi persoalan sampah. Upaya tersebut adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan melakukan reduksi timbunan sampah pada sumbernya (rumah tangga). Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) mensosialisasikan pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat dengan harapan untuk mengurangi volume sampah yang terus meningkat. Prinsip 3R yakni *reduce* (mengurangi), *reuse* (mengggunakan kembali), dan *recycle* (mendaur ulang) menjadi hal yang terus disosialisasikan kepada masyarakat dan diiringi dengan adanya pembentukan Bank Sampah - Bank Sampah di masyarakat. Hal tersebut sudah disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2012

dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 13 Tahun 2012.

Program Bank Sampah di Kota Yogyakarta merupakan upaya pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan sampah dari rumah tangga yang merupakan unit terkecil sumber produksi sampah. Namun kontribusi apakah yang mampu diberikan oleh program bank sampah dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta. Dengan mengkaji pengelolaan sampah rumah tangga mandiri berbasis masyarakat yang diwujudkan dalam program bank sampah ini, diharapkan dapat memberikan masukan terhadap peningkatan dan penyempurnaan dalam program Bank Sampah yang diterapkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta agar dapat mencapai visi Kota Yogyakarta dalam aspek berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat (Bank Sampah) di Kota Yogyakarta.
2. Mengkaji partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan sampah rumah tangga (Bank Sampah) di Kota Yogyakarta.
3. Mengkaji besar reduksi timbunan sampah dari bank sampah dalam kontribusinya mengatasi permasalahan Sampah di Kota Yogyakarta.

Landasan Teori

1. Pengelolaan Sampah Mandiri Berbasis Masyarakat

Pengelolaan sampah mandiri adalah pengelolaan sampah yang dirancang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka melakukan pengurangan dan penanganan sampah dari rumah tangga masing-masing sehingga masyarakat akan mendapatkan manfaat langsung (BLH Kota Yogyakarta, 2014).

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat merupakan pengelolaan sampah yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat dilibatkan pada pengelolaan sampah dengan tujuan agar masyarakat menyadari bahwa permasalahan sampah merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat (Cecep, 2012).

Bersumber dari dua pernyataan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan

sampah mandiri berbasis masyarakat adalah suatu pengelolaan sampah yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dengan memberikan edukasi kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat menyadari bahwa permasalahan sampah merupakan tanggung jawab bersama sehingga mereka melakukan pengurangan dan penanganan sampah dari rumah tangganya masing-masing.

2. Bank Sampah

Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat di daur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi (Permen-LH No. 13:2012). Komponen bank sampah terdiri dari penabung sampah, pengelola bank sampah dan pembeli sampah. Penabung sampah adalah orang/kelompok yang membawa dan menabungkan sampah yang sudah dipilah ke bank sampah. Pengelola sampah adalah orang/komunitas yang melakukan fungsi kelembagaan di dalam bank sampah yang terdiri dari petugas yang melayani tabungan sampah yaitu direktur, wakil direktur, petugas/teller, bendahara, sekretaris, dan tenaga pengambil sampah. Pembeli sampah adalah orang/kelompok/perusahaan yang menjadi mitra bank sampah dan membeli sampah-sampah yang telah di setorkan oleh penabung sampah. (BLH Kota Yogyakarta, 2014)

3. Tujuan Bank Sampah

- Mengurangi sampah
- Memberikan nilai ekonomi pada sampah
- Sarana edukasi bagaimana mengelola sampah dengan benar dan berwawasan lingkungan

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survei dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode penelitian survei digunakan untuk mendapat data di bank sampah-bank sampah. Namun dalam penelitian ini populasi yang akan diteliti berjumlah 315 bank sampah. Sedangkan sampel berjumlah 45 bank sampah di karenakan peneliti mengkhususkan untuk meneliti bank sampah – bank sampah yang sudah beroperasi selama minimal satu tahun dan setiap bank sampah yang menjadi objek penelitian mewakili satu kelurahan. Hal itu dimaksudkan agar bank sampah yang diteliti dapat memberikan informasi dan data secara lebih banyak serta

teruji karena sudah mampu bertahan selama satu tahun.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dengan key person bank sampah dan dari Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Instrumen yang digunakan dalam wawancara adalah dengan menggunakan kuesioner. Pengertian metode kuesioner menurut Arikunto (1997), adalah pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadi atau hal-hal yang ia ketahui, sedangkan menurut Sugiyono (2008), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

Daerah kajian penelitian yang dipilih merupakan daerah perkotaan yang merupakan pusat kegiatan pemerintahan, ekonomi, maupun perdagangan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota yang menjalankan program bank sampah dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sampahnya. Program bank sampah di Kota Yogyakarta memang belum lama dijalankan yaitu baru pada tahun 2011. Pada tahun 2016 BLH merencanakan satu RW minimal memiliki satu bank sampah.

Kota Yogyakarta memiliki 615 RW yang ada di 45 Kelurahan sehingga jika ingin mencapai target BLH harus dapat memenuhi jumlah 615 bank sampah pada tahun 2016. Sikap BLH terkesan terburu-buru sehingga muncul kekhawatiran akan kualitas dan keberlanjutan bank sampah yang dibentuk BLH. Melalui penelitian ini akan di paparkan bagaimana keadaan bank sampah-bank sampah rintisan BLH dan yang sudah ada di Kota Yogyakarta sebelum program dicanangkan yang dilihat dari aspek kelembagaan, aspek operasional, aspek pembiayaan, aspek peraturan/regulasi, dan aspek partisipasi masyarakat.

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli melalui pengisian kuesioner, wawancara dengan key person bank sampah dan fasilitator kelurahan (faskel), dan observasi atau pengamatan langsung terhadap gejala-gejala yang diamati dari objek penelitian di lapangan. Sedangkan

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi dan pengurus bank sampah. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner berisi daftar pertanyaan yang diajukan secara tertulis untuk dijawab oleh responden. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data dengan mengadakan dialog secara langsung dan mengajukan pertanyaan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian untuk melengkapi data yang telah diperoleh melalui kuesioner yang telah diajukan kepada responden.

Sementara itu, observasi dilakukan untuk mengumpulkan data dengan melihat, mendengar, dan mencatat kejadian yang menjadi sasaran dalam penelitian. Indikator penilaian untuk mengetahui sistem pengelolaan sampah adalah dengan melihat lima aspek yang meliputi aspek teknik operasional, aspek kelembagaan, aspek pembiayaan, aspek regulasi/peraturan dan aspek peran serta/partisipasi masyarakat. Untuk mengetahui keadaan peran serta/partisipasi masyarakat menggunakan 8 anak tangga Arnstein. Sedangkan untuk mengetahui reduksi timbunan sampah menggunakan standar timbunan sampah per orang dalam satu hari dari SNI 19-3983-1995.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pengelolaan Sampah

Sistem pengelolaan sampah terdiri dari lima aspek yang saling berinteraksi dan saling mendukung untuk mencapai tujuan. Kelima aspek tersebut ialah aspek kelembagaan, aspek operasional, aspek pembiayaan, aspek peraturan/regulasi dan aspek peran serta/partisipasi masyarakat (SNI 3242-2008).

1. Aspek Kelembagaan

Pengurus bank sampah di Kota Yogyakarta sendiri semua sudah memiliki struktur organisasi dan memiliki administrasi yang rapi, hanya saja masih ada struktur kepengurusannya yang belum rapi, maksudnya struktur kepengurusan bank sampah masih dirangkap dengan kepengurusan RW atau RT bahkan remaja masjid sehingga administrasinya juga bercampur dengan RW, RT ataupun remaja masjid.

Komposisi struktur kepengurusan bank sampah yang rapi sendiri ada dua yaitu ketua, sekretaris, bendahara dan ketua, sekretaris, bendahara, divisi/seksi/bagian. Kedua komposisi

tersebut sebenarnya tidak terlalu menjadi kendala, namun dengan komposisi pengurus yang lebih banyak akan lebih meningkatkan kesempatan bagi bank sampah memasukkan calon-calon regenerasinya di divisi/seksi/bagian tertentu di dalam struktur kepengurusan bank sampah.

Peraturan menteri negara lingkungan hidup tentang pedoman pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle Nomor 13 Tahun 2012 memberikan petunjuk bahwa kelembagaan pelaksana kegiatan 3R melalui bank sampah dapat berbentuk yayasan atau koperasi. Sehingga kelembagaan bank sampah di Kota Yogyakarta sebaiknya dilaksanakan atau diarahkan menuju bentuk yayasan atau koperasi. Menurut data temuan lapangan, bank sampah yang ada di Kota Yogyakarta merupakan bank sampah yang dilaksanakan atau dibentuk menuju kelembagaan koperasi.

2. Aspek Operasional

Kegiatan pemilahan sampah adalah kegiatan memisahkan dan atau mengelompokkan sampah sesuai dengan jenis sampah. Jenis sampah sendiri meliputi sampah anorganik yang berupa kertas, kaca, besi, plastik dan sampah organik yang berupa daun, sisa makanan, sisam bahan masakan. Pada bank sampah pemilahan sendiri terjadi saat anggota/nasabah bank sampah melakukan aktifitasnya di rumah masing-masing (pemilahan tingkat rumah tangga). Para anggota/nasabah tersebut memilah sampah anorganik dan organik dengan me misahkannya di wadah yang berbeda-beda untuk setiap jenis sampahnya. Wadah untuk setiap jenis sampahnya sendiri sudah diberi bantuan oleh BLH berupa Tas Pilah yang terdiri dari wadah logam/kaca, wadah kertas dan wadah plastik. Sampah organik dipilah, dipotong-potong dan dimasukkan ke takakura atau komposter. Untuk bank sampah yang sudah memiliki mesin pencacah daun, sampah organik bisa di bawa ke bank sampah tersebut.

Setelah anggota/nasabah bank sampah memilah sampah di tingkat rumah tangga selanjutnya sampah hasil pilahan dibawa ke bank sampah kemudian dilakukan penimbangan menurut jenis sampah, setelah tahu nominal uang yang di dapat baru dilakukan pemotongan biaya operasional bank sampah yang besarnya ditentukan menurut kesepakatan nasabah. Langkah terakhir nominal yang di dapat nasabah di catat di buku tabungan.

Selain dijual, sampah hasil pilahan yang diterima dari nasabah juga dapat dimanfaatkan untuk di daur ulang menjadi barang yang bernilai ekonomi. Kegiatan daur ulang bisa berupa daur ulang sampah anorganik dan organik seperti tas, tempat pensil, dompet, kemoceng, baju, topi, tempat pemanggang sate, serok sampah, bunga, kompos kering dan kompos basah.

Mendaur ulang sampah menjadi barang bernilai ekonomi memang bermanfaat tetapi belum semua bank sampah di Kota Yogyakarta mampu dan mau melakukannya. Hal tersebut karena dari segi pemasaran barang-barang daur ulang masih sulit. Gaya hidup masyarakat sekarang ini masih belum mau membeli barang hasil daur ulang jika ada barang buatan pabrik yang lebih baik. Ditambah lagi harga jual barang-barang daur ulang yang masih mahal dikarenakan kesulitan, kerumitan dan produksinya yang belum banyak.

Sampah yang tidak di daur ulang akan di kumpulkan, ditimbang kemudian diangkut oleh pengepul yang di percaya oleh bank sampah. Pengepul sampah yang menjadi langganan bank sampah yang ada di Kota Yogyakarta tidak hanya satu sehingga harga yang diberikan pengepul itupun akan berbeda-beda. Dari wawancara diketahui bahwa pengurus bank sampah merasa kurang puas terhadap harga yang diberikan oleh pengepul langganannya. Mereka cenderung akan berganti-ganti pengepul untuk mencari harga yang sesuai. Hal ini yang dapat dijadikan pertimbangan bagi BLH agar segera merealisasikan bank sampah central di Kota Yogyakarta yang rencananya dibuka tahun 2015 ini.

Berdasarkan analisis dengan menggunakan standar SNI 3242-2008, dapat diketahui bahwa dari aspek operasional program bank sampah yang dicanangkan oleh BLH Kota Yogyakarta tergolong telah memenuhi standar pengelolaan sampah di permukiman dengan prinsip 3R karena aspek-aspek yang menjadi indikator penilaian sebagian besar telah terpenuhi. Beberapa penilaian yang belum terpenuhi adalah tentang belum adanya pengelolaan daur ulang dan pengomposan di skala TPS. Namun resiko dari belum tercapainya penilaian itu sudah berkurang dengan adanya pengadaan daur ulang dan pengomposan oleh bank sampah yang ada di Kota Yogyakarta. Selain itu penilaian yang belum terpenuhi adalah tentang jumlah alat

pengomposan minimal 2 untuk setiap bangunan yang lahannya mencukupi. Walaupun demikian ini dapat tergantikan dengan keberadaan pengomposan di bank sampah yang mencakup RT, RW bahkan antar RW dalam pelayanan pengomposannya.

3. Aspek Pembiayaan

Demi lancarnya suatu program maka dibutuhkan pembiayaan yang lancar dan jelas baik nominal maupun sumber dananya. Di dalam program rancangan BLH ini juga dibutuhkan pembiayaan yang lancar dan jelas agar program bank sampah dapat terus berjalan. Pembiayaan sendiri bagi bank sampah berfungsi untuk pelengkapan sarana dan prasarana, pengembangan organisasi maupun untuk kegiatan operasional rutin pengelolaan sampahnya.

Dalam pelaksanaannya, bank sampah membutuhkan biaya yang meliputi biaya investasi dan biaya operasional. Biaya investasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli/membuat/pengadaan alat-alat pendukung bank sampah seperti timbangan, mesin jahit, komposter dan tas pilah agar bank sampah dapat di awali. Sedangkan biaya operasional dan pemeliharaan adalah biaya yang dikeluarkan bank sampah untuk menjalankan kegiatannya secara rutin seperti buku tabungan, buku rekap, buku bantu, uang lelah, rapat koordinasi, pemeliharaan alat-alat bantu bank sampah dan lainnya. Untuk biaya-biaya bank sampah yang ada di Kota Yogyakarta ini dapat diminimalisir karena adanya bantuan sarana prasarana dari BLH yang berupa timbangan digital gantung, tas pilah, buku tabungan dan komposter. Khusus komposter tidak semua diberikan karena belum semua bank sampah mau dan mampu untuk melakukan daur ulang sampah organik.

Biaya investasi besarnya ditentukan oleh seluruh nasabah bank sampah sehingga akan memungkinkan berbeda untuk setiap bank sampah tapi umumnya besaran iuran berkisaran 5 % hingga 15 % dari nominal yang di dapat oleh nasabah setiap dilakukannya bank sampah. Untuk bank sampah yang jumlah nasabahnya lebih banyak akan mendapat biaya operasional yang lebih banyak pula sehingga bank sampah tersebut akan berkembang lebih cepat. jumlah nasabah yang dimaksud disini bukanlah nasabah yang hanya tercatat di buku rekap dan BLH

tetapi nasabah yang aktif menyetorkan bank sampah untuk setiap dilakukannya bank sampah. Oleh karena itu bisa dikatakan pembiayaan operasional bank sampah berkaitan dengan peranserta/partisipasi aktif dari masyarakat sekitar diadakannya bank sampah.

Bentuk bantuan sarana prasarana yang diterima oleh bank sampah bermacam-macam. Untuk tas pilah, timbangan gantung dan buku tabungan memang diberikan BLH kepada bank sampah yang sesuai syarat dan terdaftar di BLH, akan ditambah komposter bila bank sampah sudah mau dan mampu untuk melakukan daur ulang sampah organik.. Sedangkan untuk, motor pengangkut (Hercules) dan mesin jahit di dapat bank sampah dari juara lomba antar bank sampah. Bank sampah juga dapat memperoleh bantuan sarana prasarana seperti buku tabungan, timbangan, produk bahkan dana bila menjalin kemitraan dengan pihak swasta seperti unilever. Ada juga pihak swasta yang dapat diajak bermitra seperti paluma nusantara. Paluma Nusantara akan membeli minyak goreng bekas yang dikumpulkan warga ke bank sampah.

4. Aspek Peraturan/Regulasi

Regulasi atau peraturan mengenai sampah dalam bentuk undang-undang maupun perda memang sudah ada. Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah sudah membahas detail tentang pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dari pada undang-undang pengelolaan sampah sebelumnya yaitu UU nomer 23 tahun 1997. Revisi yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia tersebut dikarenakan sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu diperhatikan agar tidak mencemari lingkungan. Menyusul ditetapkannya UU baru tentang pengelolaan tersebut Pemerintah RI pada tahun 2012 menerbitkan peraturan baru mengenai pengelolaan sampah yaitu Permen RI nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan Permen Negara Lingkungan Hidup RI nomor 13 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan *reduce, reuse* dan *recycle* melalui bank sampah. Kedua peraturan yang diterbitkan pemerintah tersebut membahas mengenai pengelolaan sampah secara lebih detail dengan mengkhususkan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang di lakukan dengan 3R melalui bank sampah.

Pemerintah Kota Yogyakarta pada saat itu merespon dengan cepat peraturan tersebut sehingga menerbitkan Peraturan daerah (Perda) Kota Yogyakarta nomor 10 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Kesigapan Pemerintah Kota Yogyakarta ini mengalahkan kesigapan respon dari Provinsi DIY sendiri yang baru menerbitkan peraturan gubernur (Pergub) nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dan Pergub nomor 21 tahun 2014 tentang pedoman penanganan sampah, perizinan usaha pengelolaan sampah dan kompensasi lingkungan. Walaupun demikian Pergub melengkapi Perda Kota Yogyakarta yang sudah ada dalam hal pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Selain peraturan-peraturan tadi, pemerintah baik itu pusat, menteri, provinsi dan kota juga mencanangkan peraturan-peraturan lain mengenai sampah, diantaranya seperti peraturan mengenai sampah B 3 (bahan berbahaya dan beracun), pedoman pengelolaan sampah oleh mendagri, perda kota tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Banyak dan detailnya pemerintah Kota Yogyakarta maupun pemerintah Provinsi DIY memberlakukan peraturan/regulasi mengenai kebersihan dan persampahan ini membuka jalan bagi BLH untuk merumuskan sebuah program pengelolaan sampah rumah tangga yang berbasis masyarakat sehingga dibuatlah program bank sampah dengan target 2016 setiap RW di Kota Yogyakarta memiliki minimal satu bank sampah. Sangat disayangkan banyak pengurus yang belum mengetahui regulasi-regulasi yang mendasari di peogramkannya bank sampah ini.

Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Yogyakarta Dalam Program Bank Sampah

Berdasarkan rekapitulasi hasil jawaban dari pengurus bank sampah di Kota Yogyakarta dengan menggunakan 8 indikator derajat/tingkat partisipasi Arnstein, terlihat bahwa tujuh dari delapan indikator yang ditanyakan kepada responden terpilih mendapat nilai tinggi, hanya satu indikator saja yang mendapat nilai rendah. Artinya adalah bahwa sebagian besar indikator dalam derajat/tingkat partisipasi masyarakat di bank sampah yang ada di Kota Yogyakarta telah terpenuhi. Kondisi ini menggambarkan bahwa Program bank sampah yang dilakukan oleh BLH Kota Yogyakarta sudah cukup berhasil dalam

mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah rumah tangganya secara mandiri.

Tabel 1. Rekapitulasi Jawaban Pengurus Bank Sampah Terhadap Drajat/Tingkat Partisipasi Masyarakat

No	Indikator	Jawaban
1	Adanya Informasi Mengenai Bank Sampah	91 %
2	Adanya undangan sosialisasi/musyawarah yang berkaitan dengan program bank sampah	76 %
3	Saran Dari Masyarakat Diaplikasikan Dalam Kebijakan/Program BLH	62 %
4	Masyarakat Dapat Memberi Usulan Program Secara Langsung	91 %
5	Dialog Mengenai Bank Sampah Selain Pelatihan	76 %
6	Masyarakat Dapat Secara Aktif Mengawasi Kebijakan Mengenai Bank Sampah	73 %
7	Tingkat Kepercayaan Dari BLH Kepada Masyarakat Dalam Merencanakan Kebijakan Yang Terkait Bank Sampah	76 %
8	Ketersediaan Sarana Bagi Masyarakat Dalam Hal Pengawasan Kebijakan Terkait Bank Sampah Baik Online/Kotak Saran/Nomor Aduan	5 %

Sumber: Olahan Data Lapangan, 2015

Masyarakat diposisikan sebagai salah satu *stakeholder* utama dalam pencapaian visi Kota Yogyakarta yaitu ‘Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa yang **Berwawasan Lingkungan** dan Ekonomi Kerakyatan’, sehingga demi tercapainya aspek berwawasan lingkungan maka perlu diwujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan efisien di Kota Yogyakarta. Kondisi ini dapat dibangun dengan memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan aspirasi yang berupa usulan, kritik dan saran yang bersifat membangun dan bertanggung jawab untuk menentuka kebijakan selanjutnya dalam kaitannya mendorong kegiatan bank sampah yang sudah ada.

Kondisi tersebut sesuai dengan pemaparan Arnstein terhadap derajat/tingkat ketiga dalam teori derajat partisipasi, yaitu kekuasaan masyarakat yang terdiri dari anak tangga

kemitraan, pendelegasian kekuasaan dan pengawasan masyarakat. Anak tangga keenam adalah kemitraan dimana di tangga inilah terjadi partisipasi atau kemitraan masyarakat, pihak BLH telah menjadikan masyarakat sebagai mitra sehingga BLH transparan dan terbuka dalam menjalankan program bank sampah ini. Anak tangga ketujuh adalah pendelegasian kekuasaan disini sudah terjadi pelimpahan wewenang oleh pemerintah kepada masyarakat dan anak tangga terakhir adalah anak tangga pengawasan masyarakat disini masyarakat sudah dapat melakukan kontrol terhadap program bank sampah sehingga masyarakat bertindak sebagai pencetus, pelaku dan penerima dampak secara langsung, dari masyarakat untuk masyarakat.

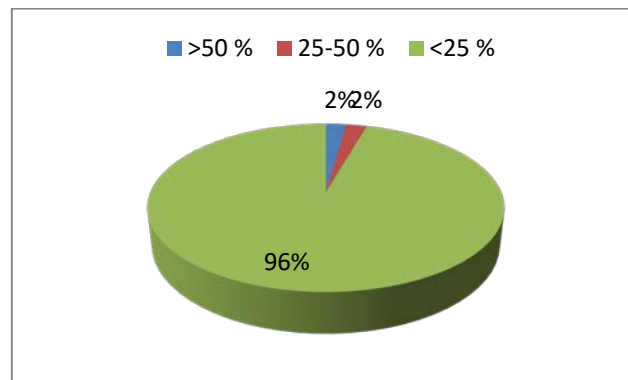
Reduksi timbunan sampah

Seiring dengan telah berjalannya program bank sampah sebagai program pengurangan sampah di level rumah tangga ini selama lebih dari tiga tahun maka akan nampak reduksi timbunan sampah yang di rasakan. Sampah yang tereduksi oleh bank sampah adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Reduksi timbunan sampah disini di hitung dengan menggunakan beberapa asumsi. Asumsi tersebut antara lain adalah semua anggota keluarga nasabah dalam satu KK berjumlah 4 orang karena memperhatikan data dari badan pusat statistik (BPS) tahun 2013 tentang rata-rata banyaknya anggota rumah tangga Kota Yogyakarta. Asumsi kedua adalah berat sampah yang dihasilkan per orang dalam satu hari mengikuti setandar nasional Indonesia 19-3983-1995, yaitu:

1. Satuan timbunan sampah kota sedang 2,75-3,25 L/orang/hari atau setara dengan 0,70-0,80 kg/orang/hari.
2. Satuan Timbunan sampah kota kecil = 2,5-2,75 L/orang/hari atau setara dengan 0,625-0,70 kg/orang/hari

Keterangan : Untuk kota sedang jumlah penduduknya $100.000 < p < 500.000$. Untuk kota kecil jumlah penduduknya < 100.000 .

Kota Yogyakarta memiliki jumlah penduduk sebanyak 457.668 (RPJMD Kota Yogyakarta, 2012) maka dari itu menurut SNI 19-3964-1995 Kota Yogyakarta tergolong kota sedang sehingga hasil perhitungan reduksi timbunan sampah dari bank sampah dapat di klasifikasikan sebagai berikut:



Gambar 1: Klasifikasi Persentase Reduksi timbunan sampah Dalam Satu Minggu

Sumber: Olahan Data Lapangan, 2015

Persentase reduksi timbunan sampah seluruh bank sampah yang menjadi sampel untuk setiap kelurahannya setelah di klasifikasikan menurut persentase reduksi timbunan sampah yang dilakukan terhadap banyak sampah yang dihasilkan para nasabahnya. Sebanyak 2 % dari sampel mampu mereduksi timbunan sampah harian nasabahnya sebesar 25 hingga 50 % dan sebesar lebih dari 50 %. Bank sampah yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah bank sampah Anugerah 13 yang ada di Kelurahan Klitren dan bank sampah Asri Pertiwi yang beroperasi di Kelurahan Pandeyan. Kedua bank sampah tersebut mampu mereduksi timbunan sampah harian nasabahnya sebesar 64 % untuk bank sampah Anugerah 13 dan 30 % untuk bank sampah Asri Pertiwi. Hal ini menggambarkan bahwa kedua bank sampah ini adalah bank sampah yang melakukan pengurangan sampah mendekati total sampah yang dihasilkan perhari oleh nasabahnya setiap minggunya. Memang ada beberapa bank sampah yang mampu mengurangi sampah sebesar lebih dari satu ton bahkan dua ton namun jumlah reduksi timbunan sampah itu bila dibandingkan sampah yang ditimbulkan nasabahnya masih belum cukup berpengaruh bila dilihat dari sekala yang lebih besar seperti di tingkat kelurahan bahkan kota.

Sisanya terdapat 43 bank sampah yang tersebar di 43 kelurahan yang ada di Kota Yogyakarta mampu mereduksi timbunan sampah harian nasabahnya kurang dari 25 %. Bank sampah-bank sampah yang menjadi tergolong klasifikasi ini hanya mampu mereduksi timbunan sampah sebesar antara 0,3 hingga 16 persen dari sampah harian nasabahnya setiap minggunya. Anggota klasifikasi ini jauh lebih banyak dari pada kedua klasifikasi lainnya menunjukkan bahwa bank sampah-bank sampah

ini butuh perhatian lebih dikarenakan masih butuh dorongan agar mampu meningkatkan reduksi timbunan sampahnya baik itu berupa sosialisasi, pendampingan ataupun sarana prasarana.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian tentang pengelolaan sampah rumah tangga mandiri (bank sampah) berbasis masyarakat di Kota Yogyakarta ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bank sampah sebagai program pengelolaan sampah rumah tangga mandiri berbasis masyarakat bila dilihat dari empat aspek sistem pengelolaannya yaitu aspek kelembagaan, aspek operasional, aspek pembiayaan, aspek peraturan/regulasi sudah baik dan sudah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia 3242-2008 tentang tata cara pengelolaan sampah di permukiman.
2. Tujuh dari delapan indikator Arnstein yang ditanyakan kepada responden terpilih mendapat nilai tinggi, hanya satu indikator saja yang mendapat nilai rendah. Artinya bahwa sebagian besar indikator dalam derajat/tingkat partisipasi masyarakat di bank sampah yang ada di Kota Yogyakarta telah terpenuhi. Oleh karena sebagian besar indikator terpenuhi maka kondisi partisipasi masyarakat dalam program bank sampah di Kota Yogyakarta termasuk derajat/tingkat ketiga dalam teori derajat partisipasi, yaitu kekuasaan masyarakat yang mana masyarakat bertindak sebagai pencetus, pelaku dan penerima dampak secara langsung. Sehingga dapat dikatakan bahwa program bank sampah yang dilakukan oleh BLH Kota Yogyakarta sudah cukup berhasil dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah rumah tangganya secara mandiri. Hal ini juga menjawab aspek kelima dari lima aspek sistem pengelolaan sampah yaitu peranserta/partisipasi masyarakat.
3. Reduksi timbunan sampah dari bank sampah yang ada di Kota Yogyakarta bila dilihat dari lingkup keruangan yang sempit setingkat RW maka banyak bank sampah yang mempunyai prestasi reduksi timbunan sampah yang membanggakan meliputi 10 kg hingga 2 ton tetapi bila dilihat pada lingkup yang lebih luas seperti kelurahan atau bahkan kota serta membandingkannya

dengan sampah yang dihasilkan nasabahnya perhari dalam satu minggu maka reduksi timbunan sampah yang ada di setiap bank sampah yang mewakili setiap kelurahan masih perlu ditingkatkan.

SARAN

Dari hasil penelitian tentang pengelolaan sampah rumah tangga mandiri (bank sampah) berbasis masyarakat di Kota Yogyakarta ini, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Program bank sampah yang dijalankan BLH Kota Yogyakarta memang telah di pandang sebagai solusi dalam mengatasi masalah persampahan rumah tangga di Kota Yogyakarta tetapi bukan berarti suatu solusi yang relevant sekarang akan cukup relevant di kemudian hari sehingga sebaiknya BLH tetap meningkatkan dan terus melakukan usaha inovatif agar menyempurnakan program bank sampah yang sudah ada.
2. Partisipasi masyarakat adalah unsur terpenting dalam program bank sampah karena masyarakat adalah pelaku dan penerima dampak langsung dari sampah yang mencemari lingkungan. Partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta yang sudah cukup baik terhadap bank sampah yang sekarang, akan mudah berubah bila BLH kurang memperhatikan para kader/pengurus bank sampah itu sendiri. Sebaiknya pemerintah mengatur dan memberikan insentif bagi para kader bank sampah. Insentif tidak selalu harus uang tetapi bisa dalam bentuk barang atau potongan pajak bagi para kader bank sampah aktif.
3. Sarana dan prasarana yang telah diberikan kepada bank sampah sebagai investasi seperti timbangan sebaiknya dipilih yang kuat dan tidak mudah rusak demi keberlangsungan kegiatan bank sampah yang kontinyu.
4. Karena bantuan dana tidak diberikan oleh BLH maka sebaiknya terus di sosialisasi dan diadakan pelatihan mengenai daur ulang sampah agar dapat menjadi tambahan biaya operasional demi bank sampah yang berkelanjutan.
5. BLH lebih memfasilitasi para pendaur ulang yang sudah ada untuk mengkampanyekan dan melatih para kader dan masyarakat umum yang berminat serta sebaiknya BLH juga lebih memperhatikan cara memasarkan

yang cukup ampuh untuk produk-produk daur ulang yang sudah dihasilkan para kader bank sampah.

6. BLH dan para kader sebaiknya memperhatikan regenerasi kepengurusan bank sampahnya walaupun dirinya masih baru menjabat agar tidak kesulitan mencari penerusnya di kemudian hari.
7. Perlu adanya penelitian tentang kesehatan para pengurus bank sampah yang selalu berinteraksi dengan sampah demi menjawab kekhawatiran para pengurus bank sampah saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, (1997), *Prosedur Penelitian*, Jakarta : Rieke Cipta
- Arnstein, Sherry. R. 1969. "A Ladder Of Citizen Participation." *Jurnal of the Royal Town Planning Institute*. April 1969. Available at: http://www.google.com/search?q=cache:2OiCT6ha7TkJ:ntru.aiatsis.gov.au/ifamp/practice/pdfs/Arnstein_1969.pdf+a+ladder+citizen+of+partisipation&hl=id&ct=clnk&cd=2&gl=id.
- Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, (2014), *Modul Pelatihan Bank Sampah*, Yogyakarta: BLH Kota Yogyakarta
- Cecep Dani Sucipto, (2012), *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*, Yogyakarta: Gosyen Publishing
- <http://www.kotajogja.com> diakses pada tanggal 1 Oktober 2014 Pukul 20.09 WIB
- <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1283> diakses pada tanggal 27 September 2015 Pukul 01.42 WIB
- Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, 2003, Revisi Standar Nasional Indonesia (SNI) 3242-2008 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman, Jakarta
- Santosa, Afit. 2009. "Co-Management, Pendekatan Pengelolaan Sampah." Available at: diakses pada 1 Oktober 2014 Pukul 09.47 WIB
- SNI 19-3964-1995 tentang *Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan*. Badan Standarisasi Nasional.
- Sugiyono, (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta

Tim Penyusun Presiden No. 18 Tahun 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

Tim Penyusun Presiden No. 81 Tahun 2012. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

Tim Penyusun Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012. *Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah*. Jakarta: Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

Tim Penyusun Peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012. *Pemerintah Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah*. Yogyakarta: Walikota Yogyakarta.

Tim Penyusun Peraturan gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013. *Pemerintah Provinsi DIY No. 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Smpah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*. DIY: Gubernur DIY.

Tim Penyusun Peraturan gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2014. *Pemerintah Provinsi DIY No 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penanganan Sampah*. DIY: Gubernur DIY

Tim Penyusun Peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012. *Pemerintah Kota Yogyakarta No. 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2016*: Walikota Yogyakarta.

Visvanathan,C (dkk.), (2005), Asian Regional Research Programme on Sustainable Solid Landfill Management in Asia. Proceeding Sardinia 2005, Tenth International Waste Management and Landfill Symposium

